

33530 8804



**PENDAPATAN  
REGIONAL  
JAWA TENGAH  
1983 - 1986**

**IV**

Proyek Penyempurnaan dan Pengembangan  
Statistik Ekonomi Regional Jawa Tengah

1984 - 1986

Kerja sama

**BAPPEDA & KANTOR STATISTIK**

PROVINSI JAWA TENGAH

-86  
statistik



**PENDAPATAN  
REGIONAL  
JAWA TENGAH  
1983 ~ 1986**

**IV**

Proyek Penyempurnaan dan Pengembangan  
Statistik Ekonomi Regional Jawa Tengah

1984 - 1986

Kerja sama

**BAPPEDA & KANTOR STATISTIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
I S M A I L



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**S A M B U T A N**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Memerangi kemiskinan dan kebodohan adalah merupakan tugas pokok setiap insan pembangunan.

Telah menjadi tekad kita bersama, bahwa pembangunan yang kita laksanakan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengejar ketinggalan-ketinggalan kita, dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju.

Berbagai upaya telah kita laksanakan guna mewujudkan cita-cita yang luhur seperti tersebut diatas, dan kita sepakat tidak akan berhenti selama kekuatan masih ada. Untuk itu semangat dan kreativitas tidak boleh memudar. Namun demikian kita tidak boleh lepas kontrol, dalam arti kita harus tetap realistis, kita harus mampu menjaga keseimbangan antara angan-angan dan kemampuan. Untuk itu setiap derap langkah kita harus berpedoman pada fakta atau data yang ada. Dalam hal ini peranan data yang memadai tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu saya menyambut gembira atas upaya Kantor Statistik Provinsi Jawa Tengah, yang selalu menyajikan data-data statistik yang diperlukan seperti halnya statistik Pendapatan Regional Jawa Tengah secara berkala.

Dengan dikeluhkannya oleh Team Penyusun, bahwa kendala data dari berbagai pihak yang menyangkut mutu dan ketepatannya yang masih perlu ditingkatkan, karenanya melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada semua pihak untuk membantu Kantor Statistik, agar supaya publikasi yang akan datang menjadi lebih baik.

Selamat bekerja.

Semarang, Pebruari 1988



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

( ISMAIL )

## P R A K A T A

Publikasi Pendapatan Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986 ini merupakan lanjutan dari publikasi sebelumnya. Namun demikian didalam publikasi ini, ada sedikit perubahan, misalnya mengenai tahun dasar yang digunakan. Untuk publikasi ini tahun 1983 ditetapkan sebagai tahun dasar yang baru.

Kami menyadari bahwa kebutuhan data statistik ekonomi bagi konsumen data, dewasa ini jauh meningkat baik ruang lingkup maupun kemutakhirannya ( up to date ). Untuk itu berbagai upaya telah kami tempuh. Namun demikian kami masih menjumpai hambatan yaitu berupa lambatnya pelaporan yang masuk dan mutu data dari beberapa pihak yang belum memadai.

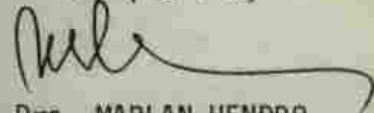
Dengan rendah hati kami mohon kepada semua pihak, khususnya Instansi yang terkait untuk mengamati perkembangan data yang tercantum didalam Publikasi ini. Bilamana dijumpai ketidak wajaran, agar supaya secepatnya memberitahukan kepada kami, untuk dilakukan perbaikan seperlunya.

Selanjutnya penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah memberi petunjuk sehingga memungkinkan terbitnya publikasi ini. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kami. Khususnya Bapak Kepala Biro Pusat Statistik Jakarta, Saudara Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah dan Unsur Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang ,                      Pebruari                      1988

KANTOR STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

K e p a l a ,



Drs. MARLAN HENDRO.

NIP :                      340000122.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I  
(BAPPEDA TINGKAT I)

JL. Pemuda 127 - 133 Telp. 285591 - 285592 Semarang

KATA PENGANTAR

Dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Perda. No. 3 Tahun 1984 ) telah digariskan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Ke empat Daerah, dimana kesemuanya diarahkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai secara optimal dan disamping itu juga dapat dicapai kesinambungan serta kesatuan yang serasi daripada Pelita I sampai dengan Pelita IV dan seterusnya, perlu adanya berbagai upaya dari para penentu kebijaksanaan serta berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kegiatan diberbagai bidang. Namun disadari akan adanya keterbatasan kemampuan, sehingga dirasakan perlu adanya sarana penunjang, antara lain data statistik yang dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan/kebijaksanaan, pemantauan laju pembangunan, evaluasi hasil-hasil pembangunan serta bahan informasi bagi semua pihak yang memerlukannya, termasuk dalam hal ini Statistik Ekonomi Regional Jawa Tengah.

Adanya perubahan situasi, kondisi maupun waktu, data-data yang telah ada dimungkinkan tidak dapat lagi mencakup berbagai aspek yang sudah berkembang. Oleh karena itu dalam tahun anggaran 1987/1988 ini BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah bekerjasama dengan Kantor Statistik Propinsi Jawa Tengah bermaksud untuk menyempurnakan dan mengembangkan data statistik yang telah ada, khususnya data Statistik Ekonomi Regional Jawa Tengah Tahun 1984-1986.

Dengan telah selesai serta tersusunnya laporan akhir penelitian ini, kepada semua pihak dan khususnya kepada Kantor Statistik Propinsi Jawa Tengah yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini, kami ucapkan terimakasih serta penghargaan yang sebesar besarnya.

Semoga hasil penyempurnaan dan pengembangan Statistik Ekonomi Regional Jawa Tengah Tahun 1984 - 1986 ini bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah serta Bangsa dan Negara umumnya.

Semarang, Maret 1988



## PENJELASAN TEAM PENYUSUN

Tertib administrasi suatu kegiatan akan dicerminkan oleh mutu data statistik yang dihasilkan. Semakin lengkap dan tertib administrasinya baik, serta ditunjang oleh kesadaran sosial dan nasional yang tinggi, maka akan semakin mantab penyajian data yang dihasilkan. Demikian halnya dengan mutu data publikasi Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986.

Dengan adanya Sensus Ekonomi 1986, maka semakin lengkap tersedia, sehingga untuk beberapa sektor ekonomi memanfaatkan periode tersebut sebagai banch-mark data untuk perhitungan selanjutnya.

Disamping itu untuk publikasi ini juga telah diadakan perbaikan tahun dasar, yaitu tahun 1983 sebagai tahun dasar yang baru. Untuk itu kepada pembaca data supaya lebih hati-hati.

Seperti pada publikasi sebelumnya, pada publikasi PDRB 1983 - 1986, disajikan dalam 4 (empat) buah buku, yaitu :

- Buku I berisi : Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986 menurut sektoral. Didalam buku ini disajikan tabel-tabel pokok dan ulasan singkat.
- Buku II berisi : Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986 secara terinci menurut sektor ekonomi, berikut penjelasan metode penghitungannya.
- Buku III berisi : Pendapatan Regional Daerah Tingkat II se Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986, menurut sektor ekonomi berdasarkan hasil perhitungan secara alokasi.
- Buku IV berisi : Pendapatan Regional Jawa Tengah 1983 - 1986 menurut pendekatan penggunaan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna, terutama yang diakibatkan oleh mutu data yang kurang baik, serta kelambatan data dan kelengkapan data yang belum sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami nantikan.

Terima kasih.

TEAM PENYUSUN,

DAFTAR - ISI

	Halaman
Sambutan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Penjelasan Umum Team Penyusun .....	iii
Daftar Isi .....	v
Bab I. Pendahuluan .....	1
Bab II. Metode Penghitungan .....	3
2.1. Umum .....	3
2.2. Konsumsi Rumah Tangga .....	4
2.3. Konsumsi Lembaga Tak Mencari Untung .....	8
2.4. Konsumsi Pemerintah, Hankam .....	9
2.5. Pembentukan Modal .....	11
2.6. Ekspor dan Impor .....	13
Bab III. Ulasan Singkat .....	15
3.1. Komposisi dan Perkembangan Komponen Penggunaan P D R B .....	15
3.2. Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB .....	16
3.3. Distribusi Penggunaan P D R B .....	17
3.4. Indek Implisit P D R B Menurut Penggunaan .....	18





Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.1.	Produk Domestik Regional Bruto menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986 .....	19
Tabel 1.2.	Produk Domestik Regional Bruto menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 1983 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986 .....	20
Tabel 1.3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986 .....	21
Tabel 1.4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan Th. 1983 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1983-1986 ...	22
Tabel 1.5.	Indek Berantai Produk Domestik Regional Bruto menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986 .....	23
Tabel 1.6.	Indek Berantai Produk Domestik Regional Bruto menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar <sup>H</sup> arga Konstan tahun 1983 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1983-1986....	24
Tabel 1.7.	Indek Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986 .....	25
Tabel 1.8.	Indek Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto menurut Komponen Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan Th. 1983 di Prov. Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986 ....	26
Tabel 1.9.	Indek Implisit Produk Domestik Regional Bruto menurut Komponen Penggunaan di Provinsi Jawa - Tengah Tahun 1983 - 1986 .....	27
Tabel 2.1.	Nilai Konsumsi Perkapita Pertahun Penduduk Atas Dasar Harga Berlaku di Prov. Jawa Tengah Th. 1983-1986	28
Tabel 2.2.	Nilai Konsumsi Perkapita Pertahun Penduduk Atas Dasar Harga Konstan 1983 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986 .....	29
Tabel 2.3.	Distribusi Persentase Nilai Konsumsi Perkapita Pertahun Penduduk Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986 .....	30
Tabel 2.4.	Distribusi Persentase Nilai Konsumsi Perkapita Pertahun Penduduk Atas Dasar Harga Konstan 1983 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1983 - 1986 .....	31

BAB. I

P E N D A H U L U A N

Penghitungan Pendapatan Regional dapat ditempuh melalui beberapa metode pendekatan, yaitu dengan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan metode pendekatan pengeluaran. Dari ketiga metode tersebut yang telah berhasil diterbitkan secara rutin adalah metode pendekatan produksi. Pada kesempatan ini Kantor Statistik Provinsi Jawa Tengah berusaha menyajikan Produk Domestik Regional Bruto dengan metode pendekatan pengeluaran sebagai kelanjutan terbitan yang lalu. Dalam penyajian ini dapat dilihat komposisi penggunaan barang dan jasa, baik yang diproduksi dari wilayah atau daerah itu sendiri maupun yang berasal dari daerah - lain ( barang - barang impor ).

Secara garis besar barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi, bila dilihat dari segi penggunaannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

1. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka proses produksi yang habis sekali pakai, yang dalam hal ini disebut dengan - konsumsi antara ( intermediate consumption ).
2. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi konsumsi masyarakat yang disebut konsumsi akhir ( final consumption ).

Barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi antara akan habis dalam produksi, untuk selanjutnya tidak ikut dalam pembahasan ini. Sedangkan barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi akhir meliputi :

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
2. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Pembentukan modal tetap bruto
5. Perubahan stock dari bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi
6. Ekspor.

Barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai sektor ekonomi dalam suatu wilayah kadang belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam wilayah itu sendiri, oleh sebab itu perlu mendatangkan barang dan jasa dari wilayah lain yang lazim disebut dengan barang impor. Barang impor ini dapat berasal dari luar wilayah saja.

Dengan terlihatnya barang .....

Dengan terihatnya barang impor kedalam suatu wilayah, maka perhitungan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) menurut penggunaan mencakup komponen - komponen permintaan akhir dan impor yang dirinci sebagai berikut :

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.
2. Pengeluaran Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung.
3. Pengeluaran konsumsi Pemerintah dan Hankam
4. Pembentukan modal tetap bruto
5. Perubahan Stock
6. Ekspor keluar wilayah.
7. Impor dari luar wilayah.

-oOo-

<https://jateng.bps.go.id>

BAB. II

METHODE PENGHITUNGAN

I. U M U M

Untuk dapat memperoleh angka - angka PDRB menurut penggunaannya dilakukan penghitungan secara langsung pada komponen - komponen yang tercakup. Namun karena mengalami kesulitan dalam hal kelengkapan data, sehingga ada kompo - nen yang dihitung secara rasional, dengan berdasarkan pada penghitungan sek - toral. Dari komponen - komponen yang tercakup dalam penghitungan PDRB menu - rut penggunaan seperti telah diuraikan diatas, dapat dinotasikan kedalam su - atu rumus persamaan sebagai berikut :

$$Y + M = C + I_f + I_s + E$$

dimana : Y = Produk Domestik Regional Bruto

M = Impor

C = Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah, Lembaga swasta yang ti - dak mencari untung.

$I_f$  = Pembentukan Modal tetap bruto

$I_s$  = Perubahan stock

E = Ekspor.

Rumus tersebut dapat disederhanakan menjadi :

$$Y = C + I_f + I_s + E - M$$

$$Y = C + ( I_f + I_s ) + ( E - M )$$

$$Y = C + I + ( E - M )$$

dimana : I : Investasi

$E - M$  : Ekspor netto

Dengan berdasarkan pada persamaan terakhir ini PDRB menurut penggunaan da - pat digolongkan menjadi 3 ( tiga ) komponen besar yaitu :

1. Untuk konsumsi yang mencakup :

- Konsumsi rumah tangga
- Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung
- Pemerintah dan Pertahanan - Keamanan.

2. Untuk investasi meliputi :

- Pembentukan modal tetap bruto
- Perubahan stock barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi.

3. Untuk penggunaan diluar wilayah netto.

- Ekspor keluar wilayah dan keluar negeri dikurangi.
- Impor dari luar wilayah dan dari luar negeri.

Untuk menghitung komponen - komponen tersebut banyak sumber data yang dipergunakan, karena setiap komponen mempunyai ruang lingkup yang berbeda, begitu pula metode estimasinya.

## II. KONSUMSI RUMAH TANGGA

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dengan tujuan untuk dikonsumsi selama periode satu tahun, tidak membedakan konsumsi yang dilakukan didalam atau diluar wilayah / daerah. Kemudian dikurangi dengan hasil penjualan netto barang - barang bekas atau afkiran.

Selain pengeluaran untuk konsumsi seperti makanan, minuman, pakaian, bahan bakar dan jasa dihitung pula pengeluaran atas pembelian barang - barang yang tak ada duanya ( barang yang tidak diproduksi kembali ) seperti : hasil karya seni, barang - barang antik dan sebagainya. Sedangkan pembelian barang modal yang dapat diraba seperti : mobil, meubelair, radio, TV, kulkas dan lain - lain apabila penggunaannya disamping untuk konsumsi rumah tangga juga dipakai untuk usaha, maka nilai pembelian, biaya pemeliharaan dan lain - lainnya harus dipisahkan secara proporsional sesuai dengan penggunaannya.

Pembelian atau pembangunan rumah baru tidak termasuk konsumsi rumah tangga, tetapi pengeluaran terhadap rumah yang ditinggali seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening listrik, telepon, air dan lain - lain merupakan pengeluaran untuk konsumsi. Pengeluaran lain yang termasuk konsumsi yaitu untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa - jasa lain yang diperlukan untuk keperluan rumah tangga.

Dalam penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga ada dua macam konsep yaitu :

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga diwilayah domestik suatu region.
- b. Pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk suatu region.

Pengeluaran .....

Pengeluaran konsumsi rumah tangga diwilayah domestik suatu region meliputi se-  
luruh pengeluaran yang dilakukan oleh anggota rumah tangga baik penduduk itu  
sendiri maupun penduduk region lain. Yang termasuk penduduk region lain ada-  
lah staf kedutaan asing, staf perwakilan daerah turis asing dan lain - lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga pendu-  
duk suatu region adalah pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk region itu -  
saja, tidak termasuk pengeluaran penduduk region lain ; menurut konsep ini  
mencakup pembelian barang dan jasa yang langsung dilakukan penduduk region -  
ini diluar negeri atau di region lain.

Oleh karena keterbatasan data yang tersedia tidak mungkin kedua konsep  
dilakukan, maka cara yang dipakai hanya pada konsep yang kedua, dengan tidak  
mengurangi tingkat ketelitian dalam penghitungan. Sumber data yang diperguna-  
kan untuk menghitung beberapa pengeluaran rumah tangga adalah hasil survei pe-  
ngeluaran konsumsi rumah tangga yang dilakukan dalam rangka survei Sosial Eko-  
nomi Nasional ( SUSNAS ) yang ditangani oleh Biro Pusat Statistik. Untuk es-  
timasi pengeluaran konsumsi rumah tangga Jawa Tengah dipakai hasil pengolahan  
Susenas tahun 1984 di daerah pedesaan dan perkotaan Jawa Tengah dan sebagai -  
data pembanding dipergunakan hasil Susenas tahun 1980.

Konsumsi rumah tangga menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional meli-  
puti :

- i. Makanan, minuman dan tembakau baik yang termasuk dirumah sendiri mau-  
pun masakan yang sudah jadi.
- ii. Perumahan, bahan bakar, penerangan dan air.
- iii. Barang - barang dan jasa - jasa.
- iv. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
- v. Barang - barang tahan lama.
- vi. Pajak pemakaian dan premi asuransi jiwa.
- vii. Pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara.

Pengeluaran rumah tangga yang dikategorikan tidak termasuk konsumsi adalah :

- i. Pengiriman uang / menyumbang.
- ii. Pengeluaran untuk menabung.
- iii. Membeli surat - surat berharga / benda tak bergerak.
- iv. Premi asuransi bukan asuransi jiwa.

- v. Membayar / meminjam hutang.
- vi. Membangun / membeli rumah.
- vii. Pengeluaran untuk usaha rumah tangga.

Kadang - kadang antara pengeluaran konsumsi dengan pengeluaran bukan - konsumsi terutama yang digunakan sebagai usaha rumah tangga tidak bisa dipisahkan sehingga hasil penghitungannya kelebihan ( over count ) oleh karena itu seharusnya ada pengurangan untuk hal - hal semacam itu, namun hal tersebut dapat menutup pada hal - hal yang lain yang penghitungannya masih under count.

Dari hasil penghitungan Susenas dapat diperoleh jumlah konsumsi bahan makanan untuk periode satu minggu dan data nilai konsumsi non makanan untuk periode satu bulan. Untuk lebih memudahkan estimasi selama satu tahun diperlukan asumsi - asumsi :

a. Bahan Makanan :

Estimasi jumlah konsumsi sebulan ( dalam bulan pencacahan ) sama dengan  $\frac{30}{7}$  dikalikan konsumsi seminggu.

Nilai konsumsi setahun diperoleh dari penjumlahan selama 12 bulan dari hasil perkalian konsumsi sebulan dikalikan rata - rata harga pada bulan pencacahan dikalikan relatif harga setahun terhadap harga pada bulan - pencacahan.

Secara matematis dapat dinotasikan sebagai berikut :

$$C_{ib} = C_{im} \times \frac{30}{7}$$

$$C_{it} = \sum_j C_{ib} \times \frac{P_{ij}}{P_{io}} = \sum_j \frac{C_{ib}}{P_{io}} \times P_{ij} = \sum_j Q_{ib} \times P_{ij}$$

dimana :  $C_{im}$  = Nilai konsumsi per kapita selama seminggu

$C_{ib}$  = Nilai konsumsi per kapita selama sebulan

$C_{it}$  = Nilai konsumsi per kapita selama setahun

$P_{ij}$  = Rata - rata harga komoditi i pada bulan j

j = dari Januari s/d Desember

$P_{io}$  = Rata - rata harga komoditi i pada bulan pencacahan

$Q_{ib}$  = kuantum per kapita selama sebulan

i = Jenis barang / komoditi.

b. Non Makanan

Nilai konsumsi non makanan sebulan telah tersedia dalam pengolahan Susenas oleh karena itu untuk menghitung nilai konsumsi selama setahun di peroleh dengan cara menjumlahkan hasil kali antara nilai konsumsi bulan dengan re latif harga terhadap harga pada bulan pencacahan.

Perkiraan konsumsi rumah tangga per kapita pada tahun - tahun yang tidak a da survei konsumsi dilakukan dengan mempergunakan elastisitas konsumsi ti ap jenis barang. Faktor yang dominan berpengaruh pada perubahan konsumsi - rumah tangga adalah perubahan pendapatan.

Pengaruh tersebut didasarkan suatu anggapan bahwa : " Perubahan jumlah kon sumsi makanan dipengaruhi oleh adanya perubahan pendapatan ".

Anggapan tersebut didasarkan pada kelaziman dari pada tingkah laku masyara kat yang antara lain sebagai berikut : dengan adanya kenaikan pendapatan - konsumsi bahan makanan non olahan secara alamiah akan berkurang dan seba liknya konsumsi makanan olahan akan meningkat.

Elastisitas konsumsi yang biasa disebut dengan koefisien elastisitas diper oleh suatu analisa silang antara variabel pendapatan dengan variabel kon sumsi dari data hasil pengolahan Susenas 1980. Dalam Susenas 1980 tersebut data pendapatan tidak dapat diperoleh sehingga diasumsikan bahwa total pen dapatan sama dengan total pengeluaran, dan data konsumsinya dipakai kwan tum konsumsi selama seminggu. Regresi yang diperoleh diharapkan dapat meng gambarkan pula konsumsi rumah tangga untuk masing-masing jenis barang. Per samaan regresi yang dipakai adalah persamaan Exponential yang dirumuskan - sebagai berikut :

$$Q = a.Y^b$$

dimana : Q = konsumsi  
Y = kelompok pengeluaran  
a = suatu bilangan tetap  
b = koefisien arah.

Bentuk persamaan ini dapat dimodifikasi dalam bentuk persamaan linear loga ritma dengan alasan untuk mempermudah penghitungan, yaitu :

$$\log Q = \log a + b \log Y$$

Elastisitas yang dicari adalah koefisien arah b dari regresi tersebut, se dangkan untuk konsumsi rumah tangga dari kelompok bukan makanan diperkira kan dengan menggunakan hasil pengolahan Susenas tahun 1976, 1980 dan 1984.



Penghitungan konsumsi makanan pada tahun -- tahun yang tak ada survei dipakai formulasi :

$$C_{it} (n + 1) = C_{it} (n) + b \cdot d_{pt} \cdot C_{it} (n)$$

$$\text{atau } C (n + 1) = C_n (1 + b \cdot d_{pt})$$

$$\text{dimana : } C_n = \sum_i C_{it} \quad \text{dan} \quad C (n + 1) = \sum_i C_{it} (n + 1)$$

$C_n$  = Perkiraan konsumsi bahan makanan per kapita setahun pada tahun n

$C_{n+1}$  = Perkiraan konsumsi bahan makanan per kapita setahun pada tahun ( n + 1 )

b = elastisitas

$d_{pt}$  = perubahan pendapatan perkapita.

Dengan mengalikan konsumsi bahan makanan per kapita setahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun didapat perkiraan total konsumsi penduduk pada masing masing tahun untuk bahan makanan. Apabila ditambahkan konsumsi non makanan setahun diperoleh tabel konsumsi rumah tangga setahun.

Untuk mendapatkan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan, didiflasi dengan Indek Harga Konsumen.

### III. KONSUMSI LEMBAGA SWASTA TIDAK MENCARI UNTUNG.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung yaitu lembaga / badan swasta - yang memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat seperti : organisasi serikat buruh, persatuan para ahli, organisasi politik, badan keagamaan, lembaga penelitian, pendidikan, kesehatan dan organisasi - organisasi kesejahteraan - masyarakat yang khusus melayani masyarakat dan mengutamakan keuntungan. Pada umumnya lembaga ini dalam menjalankan kegiatannya ditunjang oleh sumber dana dari sumbangan, transfer dari masyarakat atau iuran dari para anggota.

Sedangkan yang menjadi pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tak mencari untung tersebut meliputi pembelian barang dan jasa dan penerimaan transfer dalam bentuk natura, pembayaran upah dan gaji, penyusutan barang modal dan pajak tak langsung netto yang dibayarkan oleh lembaga ini, dikurangi dengan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung pada umumnya berbentuk Yayasan tetapi ada juga yang berstatus badan hukum yang lain.

Sebagian dari lembaga .....

Sebagian dari lembaga - lembaga ini ada yang dikelola oleh Pemerintah. Apabila keuangan dan pengawasannya dikelola oleh pemerintah sebagian besar atau seluruhnya, maka lembaga ini dimasukkan sebagai kegiatan pemerintah. Namun apabila lembaga ini melakukan kegiatannya sama dengan yang dilakukan Pemerintah, tetapi sumber dananya sebagian besar dari swasta sedangkan Pemerintah hanya memberikan sumbangan, maka kegiatan ini dimasukkan sebagai kegiatan lembaga swasta tidak mencari untung.

Pengeluaran konsumsi oleh kegiatan lembaga seperti tersebut diatas sama dengan jumlah biaya pengelolaannya tanpa memperhatikan sumber pembiayaannya, kecuali yang diperoleh dari subsidi Pemerintah.

Dalam perhitungan Output lembaga swasta tidak mencari untung, subsidi ini harus dikeluarkan, dan dikelompokkan kedalam pengeluaran konsumsi pemerintah sehingga terlihat peranan lembaga swasta yang tidak mencari untung secara murni. Akan tetapi kegiatan seluruh lembaga swasta yang tidak mencari untung di Jawa Tengah sampai saat ini masih sulit diperoleh datanya yang terinci; sehingga cara yang ditempuh untuk estimasi pengeluaran konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung dengan menjumlahkan output sektor jasa - jasa Sosial ke masyarakatan dimana lembaga yang tidak mencari untung banyak berperan.

Misalnya : Jasa Pendidikan, jasa kesehatan, panti asuhan dan sejenisnya, palang merah dan sebagainya, yang sudah tercakup dalam penghitungan sektoral.

#### IV. KONSUMSI PEMERINTAH, PERTAHANAN & KEAMANAN.

Berdasarkan nilai pengeluaran yang dipergunakan sebagai konsumsi Pemerintah adalah sama dengan besarnya nilai produksi yang dihasilkan untuk keperluan konsumsi sendiri. Sedangkan produksi pemerintah adalah berupa jasa. Nilai dari pada jasa ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, penyusutan, pajak tak langsung dikurangi dengan penerimaan jasa yang diberikan ( Non Commodity Sales ) dan nilai penjualan barang - barang yang di produksi ( Commodities Product ) dari kegiatan - kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah.

Kegiatan pemerintah meliputi semua kegiatan administrasi pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah termasuk juga administrasi pertahanan dan keamanan. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah Tingkat I ( Provinsi ) Tingkat II ( Kabupaten / Kotamadya ) dan pemerintah tingkat desa.

Dalam kegiatan ini tidak termasuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara seperti : Perum, Perjan, PT. ( Persero ), PN dan sebagainya, karena kegiatan - kegiatan ini telah tercakup dalam sektor yang bersangkutan atau lapangan usaha masing - masing.

Pada umumnya kegiatan pemerintah adalah kegiatan menyediakan jasa pelayanan umum untuk masyarakat. Jasa tersebut secara ekonomis sulit untuk dinilai. Oleh karena itu kegiatan pemerintah tidak sama dengan kegiatan ekonomi lainnya.

Sehingga kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan banyak yang tidak dapat diukur, karenanya pendekatan yang dipakai untuk menilai produksinya adalah dengan pendekatan pengeluaran, yaitu yang merupakan pengeluaran konsumsi Pemerintah.

Untuk memperkirakan besarnya nilai produksi yang dikonsumsi sendiri dilakukan dengan jalan menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, yang terdiri dari :

1. Dari kelompok pengeluaran rutin, yang meliputi belanja pegawai baik berupa uang maupun in natura, belanja barang termasuk didalamnya biaya perjalanan dinas, biaya perbaikan ringan / pemeliharaan dan belanja rutin lainnya.
2. Dari kelompok belanja pembangunan, yang dipergunakan untuk pengeluaran yang bersifat rutin, yaitu untuk belanja pegawai diperkirakan sebesar 5,75 % dan untuk belanja barang sebesar 9,13 %.
3. Pengeluaran penyusutan barang - barang modal pemerintah.

Pembelian barang - barang yang bersifat strategis seperti, pembelian bahan pangan, bahan bakar tidak termasuk pengeluaran belanja barang, karena barang - barang tersebut merupakan stock yang ada pada pemerintah.

Sumber data yang dipergunakan diperoleh dari realisasi Anggaran rutin dan Anggaran Pembangunan baik dari Pemerintah Daerah Tingkat I, Kabupaten / Kotamadya maupun tingkat desa ( K.1, K.2, K.3 ). Anggaran Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Hankam diperoleh dari hasil pengolahan data Bahan Administrasi Kepegawaian Negara Pusat dan data dari Biro Pusat Statistik.

Sedangkan Anggaran Pembangunan di Jawa Tengah yang dibiayai oleh pemerintah Pusat, datanya diperoleh dari Bappeda Tingkat I Jawa Tengah.

Untuk mendapatkan konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menjumlahkan upah dan gaji, belanja barang dan penyusutan dikurangi dengan non Commodity Sales dan Commodities Produces.

Penghitungan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan tahun 1983 dilakukan sebagai berikut : untuk belanja pegawai dideflate dengan Indeks Harga - Konsumen Umum Kota Semarang dan belanja barang dideflate dengan Indeks Harga Perdagangan Besar tanpa ekspor.

## V. PEMBENTUKAN MODAL.

Seperti telah dimaklumi berdasarkan teori bahwa Investasi ( Pembentukan modal tetap ) dan increase in stock ( perusahaan stock ).

### a. Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Pembentukan modal tetap bruto dalam suatu daerah / wilayah ialah seluruh barang modal baru yang dipergunakan sebagai alat memproduksi barang dan jasa lain di suatu daerah.

Pengertian barang modal adalah barang - barang yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih dalam pengertian bahwa barang - barang tersebut dipergunakan sebagai alat yang tetap dalam proses produksi. Barang-barang modal dapat berupa barang - barang yang didatangkan dari daerah lain ataupun berasal dari pengadaan dari daerah itu sendiri. Pembelian barang-barang yang tidak diproduksi lagi seperti tanah, cadangan mineral, tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto, tetapi pengeluaran untuk peningkatan daya guna tanah seperti pembukaan lahan baru / pembukaan hutan pengeringan rawa - rawa pembongkaran tanah padas dijadikan lahan sawah / pemukiman perluasan areal pertambangan adalah merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto.

Pembelian barang - barang modal bekas / afkiran dari wilayah / Daerah sendiri bukan merupakan pembentukan modal tetap bruto karena barang - barang tersebut telah terhitung sebagai barang modal pada waktu pembelian yang pertama. Kecuali pembelian barang - barang modal bekas yang berasal dari daerah lain atau dari luar negeri. Pengeluaran untuk perbaikan barang-barang modal sehingga akan mengakibatkan bertambah panjangnya umur pemakaiannya atau akan menambah kapasitas produksi termasuk juga sebagai pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto.

Pembentukan Modal Tetap Bruto meliputi :

- \* Pembentukan modal tetap dalam bentuk bangunan / konstruksi terdiri dari
  - Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal.
  - Bangunan / konstruksi lainnya seperti : jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik, instansi, komunikasi dan sebagainya.
  - Perbaikan besar dari bangunan - bangunan tersebut.
- \* Pembentukan modal berupa mesin - mesin dan alat - alat perlengkapan terdiri dari :
  - Alat - alat transpor / angkutan.

- Mesin - mesin / alat - alat perlengkapan yang digunakan dalam pertanian pertambangan, industri, listrik dan sebagainya.
- Mesin - mesin / peralatan perlengkapan pada kantor, toko, hotel, rumah sakit dan sebagainya.

\* Penanaman baru untuk tanaman keras / perluasan perkebunan.

Tanaman keras adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah - berumur satu tahun atau lebih. Pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar untuk penanaman dan perawatan sebelum mendatangkan hasil (berproduksi) dan kegiatan reboisasi yang dilakukan oleh perusahaan - perusahaan pemerintah adalah termasuk didalamnya.

- \* Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susunya, bulunya atau yang dipakai tenaganya dan lain - lain terkecuali ternak yang untuk - dipotong.
- \* Margin perdagangan atau makelar, service charge dan ongkos - ongkos peminjaman hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusahaan hutan, hak paten, hak cipta dan barang - barang bekas.

b. Perubahan Stock.

Pengertian stock disini adalah persediaan barang - barang pada akhir - tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit - unit produksi yang belum dijual, baik dalam bentuk barang yang sedang dalam proses.

Pemerintah adalah salah satu pemegang stock barang keperluan strategis seperti : bahan bakar, bahan pangan yang akan dilempar ke pasaran pada waktu krisis. Pemegang stock yang lain adalah produsen dan pedagang.

Stock pada produsen pada umumnya berupa bahan mentah, barang - barang / alat - alat yang diproduksi tetapi masih dalam proses atau barang - barang yang belum dipasarkan. Gedung - gedung / bangunan yang dalam proses tidak termasuk stock tetapi diakup dalam pembentukan modal tetap bruto.

Stock pada pemeliharaan peternakan adalah termasuk yang hanya dipergunakan sebagai ternak potong, sedangkan pemeliharaan ternak diperuntukan pembiakan diambil tenaganya, diambil bulunya serta susunya termasuk pembentukan modal tetap.

Namun perlu disadari .....

Namun perlu disadari bahwa antar kedua tujuan tersebut adalah sulit didalam prakteknya, karena pada akhirnya semua ternak akan dipotong juga.

Perubahan stock pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai stock pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai stock pada akhir tahun sebelumnya ( pada awal tahun yang bersangkutan ).

Dalam mengestimasi kedua komponen ini ( pembentukan modal ) dapat dilakukan dengan dua metode yakni :

- i. Metode langsung yaitu dengan menghitung besarnya pembentukan modal yang terjadi langsung pada sektor - sektornya meliputi : sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, industri, listrik gas dan air minum, bangunan dan konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintahan dan sektor jasa - jasa.
- ii. Metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan berdasarkan arus lalu - lintas barang dari setiap kelompok barang.

Didalam penghitungan ini, kedua metode tersebut diatas belum dapat diterapkan, karena keterbatasan data, untuk itu kedua komponen - komponen ( pembentukan modal dan perubahan stock ) tersebut diestimasi berdasarkan residual dari PDRE yang dihitung secara sektoral dikurangi dengan komponen - komponen yang sudah terhitung dengan data yang tersedia.

## VI. EKSPOR DAN IMPOR.

Kegiatan ekspor dan impor meliputi suatu transaksi yang terjadi atas suatu barang dan jasa antara masyarakat suatu wilayah dengan masyarakat wilayah lain atau dengan luar negeri.

Transaksi ini menyangkut kegiatan ekspor dan impor barang, jasa - jasa, pengangkutan, komunikasi, asuransi dan berbagai jasa lainnya seperti jasa pengangkutan, komunikasi, asuransi dan berbagai jasa lainnya seperti jasa perdagangan yang diterima para pedagang suatu wilayah atas transaksi perdagangan diluar wilayah.

Pembelian atas barang - barang keperluan pelayaran atau penerbangan yang dibeli pada waktu kapal merapat atau mendarat di pelabuhan wilayah lain atau diluar negeri.

Kapal - kapal penangkap ikan dari suatu wilayah yang menjual hasil tangkapannya langsung ke kapal asing atau ke luar negeri.

Transaksi dari .....

Transaksi dari beberapa barang tertentu, seperti barang dan jasa langsung di beli dipasar domestik oleh bukan penduduk wilayah sebagai souvenir. Atau pembelian barang dan jasa langsung di luar wilayah oleh suatu penduduk suatu region.

Hal - hal dan kejadian kegiatan ekspor dan impor atau perdagangan antar wilayah.

Tetapi barang - barang yang hanya melewati suatu wilayah sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan untuk menuju atau kembali ke suatu tempat tujuan - semula tidak termasuk disini.

Untuk mendapatkan data ekspor dan impor yang sesuai dengan konsep dan ruang lingkup diatas dewasa ini masih sulit diperoleh. Namun demikian estimasi nilai ekspor dan impor diusahakan agar mendekati konsep dan lingkungannya.

Untuk daerah Jawa Tengah yang dapat diliput adalah kegiatan ekspor - impor melalui pelabuhan laut yang menyangkut perdagangan dengan luar negeri - antar pulau.

Untuk kegiatan ekspor impor lewat darat, karena Jawa Tengah terletak berbatasan dengan Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, diestimasi berdasarkan arus barang yang lewat jembatan timbang. Mengingat jembatan timbang telah berakhir kegiatannya pada tahun 1982, maka untuk tahun 1983 diperkirakan berdasarkan persentase tahun 1982. Sumber data diperoleh dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan dari Administratur Pelabuhan-pelabuhan di Jawa Tengah, serta dari DLLAJR Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mendapatkan data ekspor dan impor atas dasar harga konstan tahun 1983 dihitung dengan cara deflasi. Sebagai deflator untuk ekspor adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPPB) Indonesia sektor ekspor tanpa minyak bumi, sedangkan untuk komponen-komponen impor dan perdagangan antar pulau dipakai IHPPB Indonesia tanpa ekspor sebagai deflatornya.

### III. ULAHAN SINGKAT

#### 3.1. KOMPOSISI PERKEMBANGAN KOMPONEN PENGGUNAAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO.

Secara umum Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, baik di hitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 1983. Apabila dihitung dengan harga berlaku Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah tahun 1983 telah mencapai Rp. 6 966,82 milyar dan pada tahun 1984 berkembang menjadi Rp. 8 111,09 milyar dan naik lagi pada tahun 1985 menjadi Rp. 9 177,17 milyar dan sekarang telah mencapai Rp. 10 575,57 milyar tahun 1986 atau telah berkembang lebih dari 1,5 kali lipat dari tahun 1983. Pada penghitungan atas dasar harga konstan tahun 1983 PDRB hanya berkembang 1,2 kali selama empat tahun terakhir pada tahun 1986 sebesar Rp. 8 560,03 milyar.

Konsumsi Rumah tangga adalah merupakan komponen penggunaan PDRB yang terbesar yaitu pada tahun 1983 mencapai Rp. 4 926,23 milyar. Komponen konsumsi rumah tangga Jawa Tengah juga mengalami peningkatan sehingga pada tahun 1986 menjadi Rp. 6 719,35 milyar menurut perhitungan harga berlaku atau telah berkembang sebesar 1,36 kali dibanding tahun 1983 tetapi menurut perhitungan harga konstan tahun 1983 pada tahun 1986 konsumsi rumah tangga mencapai Rp. 5 691,5 milyar atau meningkat 1,15 kali lipat dari tahun 1983.

Komponen konsumsi Pemerintahan dan Hankam dan juga menunjukkan peningkatan sejalan dengan meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat.

Pada tahun 1983 Pemerintah Daerah di Jawa Tengah telah menyerap PDRB sebagai konsumsi sebesar Rp 1 225,19 milyar. Dari tahun ke tahun komponen ini menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 1984 menjadi Rp. 1 411,5 milyar atas dasar harga berlaku dan pada tahun 1986 telah mencapai Rp. 1 736,6 milyar.

Apabila dihitung atas dasar harga konstan 1983 meningkat menjadi Rp 1 298,5 milyar pada tahun 1984 dan menjadi Rp 1 432,7 milyar pada tahun 1986. Sedangkan konsumsi lembaga swasta tak mencari untung menyerap hanya kecil saja yaitu pada tahun 1983 hanya mencapai Rp 101,96 milyar dan pada tahun 1986 meningkat menjadi Rp 148,03 milyar atas dasar harga berlaku.



Komponen PDRB yang dipergunakan sebagai pembentukan modal pada tahun 1986 mencapai Rp. 2 322,69 milyar atas dasar harga berlaku.

Angka ini adalah lebih besar bila dibanding pembentukan modal yang terjadi pada tahun 1985 yaitu sebesar Rp. 2 057,71 milyar. Namun bila dihitung atas dasar harga konstan tahun 1983 pada tahun 1986 nampak lebih kecil yaitu sebesar Rp 1 578,97 milyar bila dibanding pembentukan modal yang terjadi pada tahun 1983, yaitu sebesar Rp. 2 042,83 milyar.

Sedangkan komponen lain dari penggunaan PDRB yaitu sebagai ekspor - atau pengiriman barang - barang keluar wilayah di Jawa Tengah pada tahun 1983 mencapai Rp. 3 220,11 milyar dan dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan bila dihitung atas dasar harga berlaku.

Pada tahun 1984 menjadi Rp. 3 881,8 milyar dan pada tahun 1986 telah mencapai Rp. 4 063,18. Pada komponen impor yang dalam penghitungan PDRB menukut penggunaan sebagai pengurang karena berfungsi sebagai penyedia barang barang yang belum di produksi di Jawa Tengah pada tahun 1983 mencapai - Rp. 4 549,5 milyar. Komponen ini nampaknya dari tahun ke tahun semakin mengecil yaitu pada tahun 1986 menjadi Rp. 4 414,24 milyar atas dasar harga berlaku dan lebih kecil dibanding dengan perhitungan tahun 1985 yang mencapai Rp. 4 583,72 milyar.

### 3.2. PERTUMBUHAN KOMPONEN PENGGUNAAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ( PDRB ).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara riil yang dihitung berdasarkan kenaikan PDRB atas dasar harga konstan, pada tahun 1984 mencapai 7,86% dan pada tahun 1985 sebesar 6,91% dan tahun 1986 sebesar 6,55%.

Angka - angka ini adalah suatu pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan. Tetapi bila dihitung berdasarkan harga berlaku pada tahun 1984 naik sebesar 16,42%, sedang tahun 1985 sebesar 13,14% dan tahun 1986 naik sebesar 15,24%.

Namun perlu diketahui bahwa angka - angka tersebut masih mengandung unsur inflasi didalamnya.

Konsumsi Rumah Tangga pertumbuhannya mengikuti pertumbuhan ekonomi, tetapi konsumsi rumah tangga tumbuhnya nampak lebih kecil. Hal ini dimungkinkan akan terjadinya pergeseran penggunaan PDRB secara umum.

Pada tahun 1984 konsumsi rumah tangga meningkat 5,41 % dari tahun sebelumnya bila dihitung atas dasar harga konstan tahun 1983, dan tahun 1985 sebesar 6,32 % dan tahun 1986 sebesar 3,08 %.

Untuk konsumsi Pemerintah dan Hankam pada tahun 1986 meningkat 1,30% dari tahun 1985 dan tampaknya lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,92 %. Sedangkan pertumbuhan modal di Jawa Tengah tidak selalu menggembirakan, pada tahun 1986 terjadi kenaikan 3,16 %, namun tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar - 9,89 % .

Begitu pula perkembangan setiap tahun dari lalu lintas barang antar wilayah kelihatan selalu menurun. Ekspor pada tahun 1986 terjadi penurunan sebesar - 3,97 %, begitu pula pada tahun 1985 mengalami penurunan sebesar - 4,12 %.

Penurunan itu tidak saja pada arus barang keluar wilayah tetapi juga terjadi pada arus barang masuk. Pada tahun 1986 turun - 10,62 % dan tahun 1985 turun pula sebesar - 8,84 %.

### 3.3. DISTRIBUSI PENGGUNAAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ( PDRB ).

Dilihat dari distribusi persentase PDRB menurut penggunaan selama periode 1983 - 1986 terjadi pergeseran - pergeseran tingkat penyerapan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 1983. Dari perubahan - perubahan penyerapan penggunaan PDRB itu diharapkan dapat menunjang pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah.

Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 1983 atas dasar harga berlaku menyerap 70,71 % sampai tahun 1986 peranan ini menurun hingga 63,56 % dari seluruh PDRB Jawa Tengah. Sedangkan menurut perhitungan harga konstan 1983 penurunan harga sampai 66,53 % pada tahun 1986. Konsumsi pemerintah pada tahun 1983 mencapai 17,59 % dan pada tahun 1986 atas dasar harga berlaku menurun sampai 16,43 %, sedangkan menurut perhitungan harga konstan 1983 penurunan itu tidak jauh berbeda yaitu menjadi 16,74 % pada tahun 1986. Untuk tahun 1984 dan tahun 1985 nampaknya relatif stabil.

Fungsi barang - barang keluar wilayah pada tahun 1986 menyerap PDRB sebesar 46,22 % dan pada tahun 1984 meningkat menjadi 47,86 % menurut perhitungan harga berlaku.

Namun pada tahun 1985 menurun menjadi 42,56 % dan tahun 1986 menjadi 38,44 %.

Begitu pula atas dasar harga konstan tahun 1986 menurun menjadi 35,85 %. Sedangkan penggunaan barang - barang luar daerah yang masuk ke wilayah Jawa Tengah mencapai 65,30 % pada tahun 1983.

Angka ini dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 1983.

Pada tahun 1986 menurun peranannya menjadi 41,00 % bila dihitung atas dasar harga konstan tahun 1983.

Pada penggunaan PDRB sebagai pertumbuhan modal Jawa Tengah pada tahun 1983 menyerap 29,32 % namun dari tahun ke tahun peranannya menurun dan tahun 1986 menjadi 21,96 % atas dasar harga berlaku.

Sedangkan bila dihitung atas dasar harga konstan tahun 1983 menurut menjadi 18,44 % pada tahun 1986.

#### 3.4. INDEK IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ( PDRB ) MENURUT PENGGUNAAN

Indek implisit komponen penggunaan PDRB Jawa Tengah periode tahun 1983 - 1986 dapat digambarkan sebagai indikator perubahan harga komponen penggunaan PDRB pada periode tersebut.

Indek implisit konsumsi Rumah Tangga tahun 1986 mencapai 118,08 hasil ini lebih rendah dari pada implisit secara keseluruhan dari pada PDRB yaitu sebesar 123,55. Demikian pula untuk konsumsi pemerintah dan lembaga swasta yang tak mencari untung masih lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan harga - harga untuk konsumsi lebih lambat dari pada perkembangan harga - harga dan jasa yang dihasilkan di wilayah ini.

Indek implisit yang terbesar terjadi pada pembentukan modal yaitu tahun 1986 sebesar 147,10.

Tabel : 1.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN  
 ATAS DASAR HARGA BERLAKU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN:  
 1983 - 1986 ( JUTAAN RUPIAH )

JENIS PENGELUARAN	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.	4 926 232,85	5 542 574,57	6 059 869,41	6 719 353,28
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Tidak - Mencari Untung.	101 956,36	122 257,66	135 670,19	148 029,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam.	1 225 186,64	1 411 496,75	1 604 224,73	1 736 566,37
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto.	2 042 830,46	1 935 533,61	2 057 714,58	2 322 692,02
5. Perubahan Stock				
6. Ekspor Barang dan Jasa.	3 220 107,19	3 881 800,14	3 903 411,73	4 063 176,06
7. Dikurang Impor Barang dan Jasa.	4 549 498,28	4 782 569,27	4 583 718,93	4 414 244,93
8. Produk Domestik - Regional Bruto.	6 966 815,22	8 111 093,46	9 177 171,71	10 575 571,80

Tabel. : 1.2.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN  
 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1983. DIPROVINSI JAWA TENGAH.  
 TAHUN : 1983 - 1986.  
 ( Jutaan rupiah )

JENIS PENGELUARAN	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.	4 296 232,85	5 192 974,72	5 521 397,56	5 691 499,42
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Tidak - Mencari Untung.	101 956,36	113 201,53	120 019,63	126 607,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam.	1 225 186,64	1 298 534,87	1 414 363,33	1 432 695,51
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto.	2 042 830,46	1 698 573,09	1 530 556,76	1 578 966,19
5. Perubahan Stock.				
6. Ekspor Barang dan Jasa.	3 220 107,19	3 516 702,47	3 371 832,54	3 238 018,34
7. Dikurang Impor Barang dan Jasa.	4 549 498,28	4 305 405,43	3 924 604,78	3 507 761,49
8. Produk Domestik - Regional Bruto.	6 966 815,22	7 514 581,25	8 033 565,04	8 560 025,03

Tabel : 1.3.

DISTRIBUSI PROSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
 MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH. TAHUN 1983 - 1986.  
 ( % )

JENIS PENGELUARAN	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.	70,71	68,33	66,03	63,54
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Tidak - Mencari Untung.	1,46	1,51	1,48	1,40
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam.	17,59	17,40	17,48	16,42
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto.	29,32	23,86	22,42	21,96
5. Perubahan Stock				
6. Ekspor Barang dan Jasa.	46,22	47,86	42,53	38,42
7. Dikurang Impor Barang dan Jasa.	65,30	58,96	49,94	41,74
8. Produk Domestik - Regional Bruto.	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel : 1.4. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN, ATAS DASAR HARGA KONS  
TAN 1983 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN : 1983 - 1986.

( % )

JENIS PENGELUARAN	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.	70,71	69,11	68,73	66,49
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Tidak - Mencari Untung.	1,46	1,51	1,49	1,48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam.	17,59	17,28	17,61	16,74
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto.	29,32	22,60	19,05	18,44
5. Perubahan Stock				
6. Ekspor Barang dan Jasa.	46,22	46,80	41,97	37,83
7. Dikurang Impor Barang dan Jasa.	65,30	57,30	48,85	40,98
8. Produk Domestik - Regional Bruto.	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel : 1.5. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT KOMPONEN  
 PENGGUNAAN, ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN : 1983 - 1986  
 ( Tahun sebelumnya = 100,00 )

JENIS PENGELUARAN	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.	-	112,51	109,33	110,88
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Tidak Mencari Untung.	-	119,91	110,97	109,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam.	-	115,21	113,65	108,25
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto.	-	94,75	106,31	112,88
5. Perubahan Stock	-			
6. Ekspor Barang dan Jasa.	-	120,55	100,56	104,09
7. Dikurang Impor Barang dan Jasa.	-	105,12	95,84	96,30
8. Produk Domestik Regional Bruto.	-	116,42	113,14	115,24



Tabel : 1.6. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT  
 KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1983  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN : 1983 - 1986.  
 (TAHUN SEBELUMNYA = 100,00)

JENIS PENGELUARAN	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.	-	105,41	106,32	103,08
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Tidak Mencari Untung.	-	111,03	106,02	105,49
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam.	-	105,99	108,92	101,30
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto.	-	83,15	90,11	103,16
5. Perubahan Stock	-			
6. Ekspor Barang dan Jasa.	-	109,21	95,88	96,03
7. Dikurang Impor Barang dan Jasa.	-	94,63	91,16	89,38
8. Produk Domestik Regional Bruto.	-	107,86	106,91	106,55

Tabel : 1.7. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
 MENURUT KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN : 1983 - 1986  
 (TAHUN 1983 = 100,00)

JENIS PENGELUARAN	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.	100,00	112,51	123,01	136,40
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Tidak - Mencari Untung.	100,00	119,91	133,07	145,19
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam.	100,00	115,21	130,94	141,74
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto.	100,00	94,75	100,73	113,70
5. Perubahan Stock				
6. Ekspor Barang dan Jasa.	100,00	120,55	121,22	126,18
7. Dikurang Impor Barang dan Jasa.	100,00	105,12	100,75	97,03
8. Produk Domestik Regional Bruto.	100,00	116,42	131,73	151,80

Tabel : 1.8. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT  
 KOMPONEN PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN : 1983  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1983-1986 (TAHUN 1983=100,00)

JENIS PENGELUARAN	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.	100,00	105,41	112,08	115,53
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Tidak - Mencari Untung.	100,00	111,03	117,72	124,18
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam.	100,00	105,99	115,44	116,94
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto.	100,00	83,15	74,92	77,29
5. Perubahan Stock				
6. Ekspor Barang dan Jasa.	100,00	109,21	104,71	100,56
7. Dikurang Impor Barang dan Jasa.	100,00	94,63	86,26	77,10
8. Produk Domestik - Regional Bruto.	100,00	107,86	115,31	122,87

Tabel : 1.9. INDBKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, MENURUT  
 KOMPONEN PENGGUNAAN, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1983-1986  
 ( TAHUN 1983 = 100,00 )

JENIS PENGGLUARAN	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.	100,00	106,73	109,75	118,06
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Tidak - Mencari Untung.	100,00	108,00	113,04	116,92
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Hankam.	100,00	106,70	113,42	121,21
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto.	100,00	113,95	134,44	147,10
5. Perubahan Stock				
6. Ekspor Barang dan Jasa.	100,00	110,38	115,77	125,48
7. Dikurang Impor Barang dan Jasa.	100,00	111,08	116,79	125,84
8. Produk Domestik - Regional Bruto.	100,00	107,94	114,24	123,55

Tabel : 2.1. NILAI KONSUMSI PERKAPITA PERTAHUN PENDUDUK ATAS DASAR  
HARGA BERLAKU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1983 - 1986  
( Rupiah )

JENIS PENGELUARAN	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. M a k a n a n	109 416,00	117 351,00	124 734,00	137 455,80
2. Perumahan & Bahan Bakar	27 244,68	33 427,92	35 717,76	40 900,56
3. Barang-Barang & Jasa	16 055,04	18 804,00	21 248,52	22 451,16
4. Pakaian & Alas Kaki	11 306,52	12 619,08	14 133,36	14 835,96
5. Barang - barang Tahan Lama	12 277,80	13 846,32	15 372,96	15 867,96
6. Pajak Pemakaian & Ansurasi	1 855,08	2 115,48	2 413,48	2 751,12
7. Keperluan Pesta & Upacara	9 513,36	10 477,44	11 805,12	12 829,20
8. TOTAL KONSUMSI	187 668,48	208 641,24	225 425,20	247 091,76

Tabel : 2.2. NILAI KONSUMSI PERKAPITA PERTAHUN PENDUDUK ATAS DASAR  
HARGA KONSTAN 1983 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1983 - 1986  
( Rupiah )

JENIS PENGELUARAN	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. M a k a n a n	109 416,00	112 147,36	118 253,70	118 937,27
2. Perumahan & Bahan Bakar	27 244,68	29 490,84	29 433,72	32 124,24
3. Barang-Barang & Jasa	16 055,04	17 411,16	18 797,28	19 202,16
4. Pakaian & Alas Kaki	11 306,52	11 940,24	12 640,56	12 424,39
5. Barang - barang Tahan Lama	12 277,80	12 820,68	13 599,60	13 571,64
6. Pajak Pemakaian & Ansurasi	1 855,08	1 960,56	2 149,80	2 301,60
7. Keperluan Pesta & Upacara	9 513,36	9 710,28	10 519,56	10 733,04
8. TOTAL KONSUMSI	187 668,48	195 481,12	205 394,22	209 294,34

Tabel : 2.3.     DISTRIBUSI PERSENTASE NILAI KONSUMSI PERKAPITA PERTAHUN  
PENDUDUK, ATAS DASAR HARGA BERLAKU PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN : 1983 - 1986  
( % )

JENIS PENGELUARAN	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. M a k a n a n	58,30	56,25	55,33	55,63
2. Perumahan & Bahan Bakar	14,52	16,02	15,84	16,55
3. Barang-Barang & Jasa	8,56	9,01	9,43	9,09
4. Pakaian & Alas Kaki	6,02	6,05	6,27	6,01
5. Barang - barang Tahan Lama	6,54	6,64	6,82	6,42
6. Pajak Pemakaian & Ansurasi	0,99	1,01	1,07	1,11
7. Keperluan Pesta & Upacara	5,07	5,02	5,24	5,19
8. TOTAL KONSUMSI	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel : 2.4. DISTRIBUSI PERSENTASE NILAI KONSUMSI PERKAPITA PERTAHUN  
PENDUDUK, ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1983 PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN : 1983 - 1986  
(%)

JENIS PENGELUARAN	1983	1984	1985	1986
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Makanan	58,30	57,37	57,57	56,83
2. Perumahan & Bahan Bakar	14,52	15,08	14,33	15,35
3. Barang-Barang & Jasa	8,56	8,91	9,15	9,17
4. Pakaian & Alas Kaki	6,02	6,11	6,16	5,94
5. Barang - barang Tahan Lama	6,54	6,56	6,62	6,48
6. Pajak Pemakaian & Ansurasi	0,99	1,00	1,05	1,10
7. Keperluan Pesta & Upacara	5,07	4,97	5,12	5,13
8. TOTAL KONSUMSI	100,00	100,00	100,00	100,00



<https://jateng.bps.go.id>



Biro Pusat Statistik  
Kantor Statistik Propinsi Jateng  
Jl. Pahlawan No. 6 Telp. 311195-311242  
Telex 22370 PBPS 1 Sm  
Semarang

No Buku

Katalog